

**ANALISIS KONDISI INDUSTRI NASIONAL PASKA KRISIS MULTI DIMENSI 1997 TERKAIT
DENGAN PERENCANAAN PROGRAM PARTISIPASI NASIONAL PEMBANGUNAN PLTN**

Priyanto M. Joyosukarto ¹

ABSTRAK

ANALISIS KONDISI INDUSTRI NASIONAL PASKA KRISIS MULTI DIMENSI 1997 TERKAIT DENGAN PERENCANAAN PROGRAM PARTISIPASI NASIONAL PEMBANGUNAN PLTN. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan perumusan usulan pemecahan terhadap isu (masalah fundamental) terkait dengan status industri manufaktur nasional paska krisis multi-dimensi 1997. Status terkini industri nasional diperlukan sebagai pertimbangan perencanaan program partisipasi nasional pembangunan PLTN. Informasi kondisi industri diperoleh baik melalui kajian literatur maupun penyerapan berbagai pendapat, pengetahuan, dan pengalaman para praktisi melalui diskusi, seminar, pemantauan media maupun kunjungan teknis ke berbagai institusi dan/atau perusahaan. Isu teridentifikasi diklasifikasikan menjadi 5 aspek utama, yaitu struktural, operasional, teknis, finansial, dan kultural. Untuk setiap aspek tersebut telah diusulkan berbagai konsep pemecahan yang melibatkan berbagai *stakeholder* agar tercapai sinergi kebijakan pada tingkat yang paling tinggi. Aspek kultural ditengarai merupakan aspek utama yang mendasari permasalahan pada aspek yang lain. Oleh karena itu, demi kepastian arah pengembangan industri maka perlu diintroduksikan Nilai (*value*) yang tepat untuk mengendalikan perilaku *stakeholder*. Telah diusulkan implementasi Sistem Nilai alternatif, yaitu Tata Kelola Korporasi dan Manajemen Mutu Terpadu. Telah pula diidentifikasi bahwa sebagai akibat krisis 1997, tahun 1998 output industri manufaktur nasional merosot secara kumulatif -11,4%, tetapi antara 1999-2003 telah berkembang berturut-turut sebesar 3,9%, 6,0%, 3,1%, dan 3,4%. Hal ini menunjukkan bahwa sejak 2003 secara total industri manufaktur nasional telah pulih dari akibat krisis. Konsekuensinya, semua hasil studi PARNAS pembangunan PLTN sebelum krisis ekonomi dapat dipakai lagi sebagai acuan perencanaan ke depan, dengan catatan masih perlu dimutakhirkan secara berlanjut.

ABSTRACT

ANALYSIS ON THE STATUS OF NATIONAL INDUSTRIES FOLLOWING THE 1997 MULTI DIMENSIONAL CRISIS IN RELATION TO THE PLANNING OF NATIONAL PARTICIPATION PROGRAM IN THE CONSTRUCTION OF NUCLEAR POWER PLANT. Various issues (fundamental problems) related to the recent status of national manufacturing industries following the 1997 multi-dimensional crisis have been identified, analyzed, and the recommended solution has been proposed. The most recent status of national industries is deemed important to be considered in the planning of national participation for the incoming NPP Project. Information on the condition of national industries is acquired from literatures, media, seminar, as well as from discussion during technical visitation to relevant institutions and companies. The identified issues are classified into 5 aspects, i.e. structural, operational, technical, financial, and cultural. To each aspect, solution concept have been promoted by involving the stakeholder in order to achieve the highest level of synergy. Cultural aspects is perceived to be the most fundamental aspect inducing the other aspects. Therefore, for the certainty of direction of industrial development, it deemed necessary to introduce the appropriate Values System for controlling the behavior of the stakeholder. An alternative Value System has been recommended, i.e. good corporate governance and total quality management. Furthermore, it is identified that following the 1997 crisis, during 1998 the output national industries decreased -11,8% , but during 1999-2003 has been steadily increasing by 3,9%, 6,0%, 3,1%. This shows that globally, after 2003 national industries can be perceived to be well recovered from the crisis. Consequently, all the previous results of study on national participation can still be used as reference in planning national participation program, provided that an ever-ending updating study still need to be done.

Kata Kunci: *Introduksi PLTN, partisipasi nasional, industri manufaktur, krisis multi-dimensi 1997, isu krusial, partisipasi nasional, manajemen mutu terpadu.*

¹ Staf Bidang Partisipasi Industri Nasional P2EN

I. PENDAHULUAN

Telah diyakini oleh kalangan pakar bahwa terdapat korelasi linier yang positif antara tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan tingkat perkembangan industri serta tingkat konsumsi energinya, baik energi primer maupun sekunder. Dengan demikian peningkatan kebutuhan dan penyediaan energi telah menjadi keniscayaan yang tidak terhindarkan di dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Sejak beberapa tahun lalu BATAN telah melakukan kegiatan dalam rangka perencanaan pembangunan Pusat Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) yang akan dibangun di Semenanjung Muria, Jepara, Jawa Tengah. Lokasi ini merupakan calon tapak (*site*) terpilih hasil studi kelayakan yang telah dilakukan oleh Konsultan NEWJEC (1992-1995). Selain itu, selama tahun 2002-2004 BATAN bekerja sama dengan KAERI dan IAEA telah melakukan studi pra-kelayakan pembangunan PLTN-desalinasi di Madura.

Rencana pembangunan PLTN ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan listrik di Indonesia, khususnya Jawa-Bali yang menurut rencana akan mulai beroperasi pada tahun 2016 sesuai dengan rekomendasi hasil studi CADES (*Comprehensive Assessment of Different Energy Sources for Electricity Generation in Indonesia*, tahun 2001-2002).^[1] Dengan demikian bila mempertimbangkan lamanya waktu pembangunan maka secara rasional PLTN tersebut paling tidak sudah dibangun pada tahun 2010, setelah proses tender 1-2 tahun dimuka. Pembangunan PLTN di Semenanjung Muria ini selain untuk memenuhi kebutuhan listrik, juga diharapkan dapat memberikan dampak berantai (*multiplier effect*) terhadap perkembangan industri dan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

Seperti diketahui proyek PLTN bersifat multidisipliner dan padat modal sehingga perlu memanfaatkan sebesar-besarnya potensi sumber daya dalam negeri, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Selain itu, sistem instalasi PLTN juga bersifat padat teknologi sehingga memerlukan persyaratan kualitas yang tinggi agar keselamatan konstruksi dan operasi dapat dijamin pada level yang tinggi. Dengan demikian, proyek PLTN akan sangat berpotensi sebagai media alih teknologi dalam rangka mempromosikan kemajuan kemampuan industri nasional, sehingga dapat membantu membiakkan dan menumbuh-kembangkan industri nasional. Produksi komponen PLTN yang berbasis sumber daya lokal ini akan menghidupkan kegiatan industri nasional. Meningkatnya kemampuan industri nasional ini akan berarti semakin membuka peluang untuk dapat memenangkan persaingan baik berkaitan dengan pembangunan PLTN itu sendiri maupun dalam berbagai proyek lain pada tataran lokal, nasional, maupun internasional. Bila hal itu terwujud maka akan terbuka peluang terciptanya lapangan pekerjaan, sesuatu yang pada saat ini menjadi masalah krusial yang dihadapi oleh pemerintah. Efek positif berantai ini pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan membuka peluang lapangan kerja baru sehingga bermuara pada pemenuhan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Seperti kita ketahui, secara fenomenal nampak bahwa sejak krisis multi-dimensi 1997, perekonomian nasional dan juga industri nasional mengalami kemerosotan, bahkan ada berbagai pihak yang mengindikasikan adanya de-industrialiasi. Dengan alasan tersebut maka berbagai angka hasil studi partisipasi nasional pembangunan PLTN di Semenanjung Muria maupun PLTN Desalinasi di Madura menjadi meragukan, atau setidaknya harus dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi terkini industri nasional, khususnya industri manufakturing pasca krisis. Untuk itulah maka diperlukan berbagai usaha mengidentifikasi isu-isu (*masalah fundamental*) perkembangan industri manufakturing nasional, baik dalam kaitan untuk memetakan kembali permasalahan industri nasional maupun dalam kaitan dengan perencanaan program partisipasi industri nasional yang realistis.

II. TUJUAN STUDI

Studi ini ditujukan untuk (1) mengidentifikasi berbagai isu fundamental perkembangan industri manufaktur nasional sebagai masukan perencanaan program partisipasi nasional pembangunan PLTN, untuk selanjutnya, (2) melakukan analisis rinci terhadap isu fundamental sebagai bahan untuk merumuskan usulan pemecahannya dalam rangka memperbaiki kondisi industri nasional melalui sinergi kebijakan, dan (3) mengidentifikasi perkembangan kuantitatif industri manufaktur nasional paska krisis 1997 untuk pemutakhiran hasil studi partisipasi nasional.

III. METODE

Mengidentifikasi berbagai isu (masalah fundamental) industri manufaktur nasional dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan strategis, baik melalui kajian literatur maupun melalui penyerapan berbagai pengalaman praktis melalui diskusi, seminar, pemantauan media, maupun kunjungan teknis ke berbagai institusi dan/atau perusahaan untuk mengidentifikasi isu-isu bisnis aktual yang dihadapi mereka. Isu yang teridentifikasi kemudian dianalisis secara rinci untuk menguraikan akar permasalahannya dan untuk bahan perumusan usulan pemecahannya dengan mempertimbangkan berbagai kemajuan teknik manajemen dalam dunia industri. Selain itu dilakukan pula identifikasi perkembangan kuantitatif industri manufaktur nasional sebagai pertimbangan untuk pemutakhiran besarnya level partisipasi industri nasional dalam pembangunan PLTN di Muria dan PLTN Desalinasi di Madura.

IV. IDENTIFIKASI ISU - ISU FUNDAMENTAL DALAM INDUSTRI MANUFAKTURING NASIONAL

Sebagai langkah awal melakukan studi status perkembangan industri manufaktur nasional maka dipandang perlu untuk mengidentifikasi berbagai isu terkait untuk selanjutnya dianalisis dan dirumuskan usulan pemecahannya. Keseluruhan isu akan dipisahkan dan dikaitkan ke dalam 9 kelompok parameter terkait, yaitu: (A) Umum, (B) Demokrasi dan otonomi daerah, (C) Efek krisis multi dimensi 1997, (D) Sinergi kebijakan teknologi-industri, (E) Pengembangan IPTEK, (F) Kebijakan pengembangan industri 2005-2009, (G) Kondusivitas iklim investasi, (H) Kepastian hukum dan regulasi, dan (I) Kinerja ekspor-impor.

IV.1 REKAPITULASI ISU-ISU FUNDAMENTAL TEMUAN HASIL STUDI:

A. Umum:

1. Beberapa industri merasa perlu dilibatkan lebih awal dalam penyiapan proyek PLTN dengan harapan bahwa pemikiran mereka dapat ikut mewarnai kegiatan penyiapan.
2. Sebaliknya, sebagian yang lain mulanya sangat bersemangat untuk terlibat dalam partisipasi nasional tetapi karena ketidakpastian pembangunan PLTN maka semangat itu telah menurun
3. Industri nasional (khususnya swasta) cenderung pragmatis dan berorientasi profit jangka pendek semata sehingga lebih suka menerapkan *one-to-one-customer deal* dan lebih suka memilih berkecimpung di dalam *end-cycle* dari tahapan produksi (misalnya perakitan, agen penjualan (ATPM), dll.) sehingga jauh dari kemandirian.
4. Budaya merakit tersebut di atas telah memperlambat laju perkembangan sekaligus memperlemah daya saing industri nasional karena menjadikannya kurang tertarik terhadap investasi produksi bahan baku dan bahan modal dan menjadikannya tergantung kepada luar negeri.
5. Sebagai akibat dari orientasi bisnis jangka pendek ini, dalam hal pengadaan sumber daya modal pun (misalnya: mesin), mereka lebih suka membeli produk luar (misalnya: China) yang lebih murah dan menguntungkan (untuk kriteria ROI tertentu) dan cepat didapat.
6. Impor bahan baku material dikenai pajak yang lebih tinggi dibanding impor produk jadi (contoh: material *Carbon Steel* terhadap produk *boiler*, 15%:25%)

7. Pengenaan pajak terhadap penjualan mesin-mesin berat bekas (*scrapped*) membuat para pemilik lebih suka menjual ke pada pihak luar negeri, yang berakibat pada kurangnya bahan baku scrap di dalam negeri. (khususnya SUS, Carbon Steel, dan baja biasa)
8. Dalam kaitan dengan ATPM, pemakaian komponen tertentu di dalam produknya sudah diatur oleh pihak *Principle* di luar negeri sehingga pihak ATPM, bahkan pemerintah sekalipun tidak berdaya untuk menaikkan kandungan lokal.
9. Vendor PLTN enggan memasok data Struktur Rincian Biaya dan Komponen (CCBS) meski sudah melakukan kerja sama studi dengan BATAN. Data ini diperlukan untuk perhitungan level partisipasi nasional.
10. Vendor luar negeri sering mendikte penggunaan produk dengan standar tertentu yang kaku, meskipun standar yang setara (menjamin kualitas produk yang sama) telah dikuasai perusahaan nasional.
11. Untuk proyek dengan sponsor luar negeri, seringkali ditemukan adanya pemaksaan pemakaian komponen produk dari negara donor. Hal ini akan mengakibatkan beragamnya standar produk/sistem yang ada meskipun produk tersebut harus melakukan fungsi yang sama di tempat yang sama, atau setidaknya ada keterkaitan sistemik. Contoh: komponen sistem sinyal kereta api ada 7 sistem teknologi dengan standar berbeda sehingga sistem dan komponennya tidak dapat saling menggantikan.
12. Perusahaan nasional enggan memasok data CCBS produknya, diduga karena alasan rahasia bisnis, dan ketidakpastian pembelian produknya pada proyek PLTN pada hal CCBS itu sangat penting untuk menghitung level partisipasi industri nasional.
13. Belum lengkapnya code, standard, dan regulasi nasional untuk mendukung produksi komponen PLTN. Produksi sistem/komponen lintas negara memerlukan regulasi khusus.
14. Pengalaman membangun PLT Konvensional sudah banyak, tetapi pengalaman itu belum secara khusus teridentifikasi untuk dapat diintegrasikan ke dalam persiapan pembangunan PLTN, seperti yang telah dilakukan oleh negara lain (misalnya: Korea Selatan). Pengalaman tersebut mencakup aspek manajemen proyek (termasuk evolusi jenis kontrak) dan aspek teknis (*desain – procurement – manufacturing – transportation-construction -commissioning-operation-maintenance*)
15. Hanya ada satu perusahaan produsen baja nasional yang terintegrasi (yaitu PT. Krakatau Steel), dan itupun produknya hanya terbatas pada baja berbasis Fe, bukan Karbon, Nikel (SUS), Chrome, atau Titanium, atau yang lain, yang banyak digunakan untuk pembuatan sistem dan komponen industri proses dengan milieu operasi tertentu yang mensyaratkan kualifikasi material tertentu, misalnya harus tahan SCC (*Stress Corrosion Cracking*) pada temperatur tinggi.
16. Material dengan kualifikasi khusus tersebut biasanya berbasis Ni atau Cr. Untuk Ni, kita memiliki tambang di Sulawesi (PT. INCO) yang berpotensi untuk mendukung produksi SUS di Indonesia. Kebutuhan *stainless steel* (SUS) dalam negeri diperkirakan sangat besar tetapi secara kuantitatif belum diketahui. Produk PT. INCO sebagian besar diekspor
17. Material *stainless steel* (SUS) dan berbagai jenis material dasar sulit diperoleh di dalam negeri.
18. Hanya ada 1 perusahaan PMDN yang bergerak dalam manufaktur komponen berbasis SUS (yaitu PT. TRIKA AIMEX), dan itupun bahan bakunya diperoleh dari *scrap* (bukan langsung dari peleburan bijih hasil Fe dan Ni tambang).
19. Ketidaksielarasan kebijakan antar instansi terkait, misalnya : KRT- DEPERIND, ESDM-DEPPERIND, DEPPERIND-KADIN di dalam perencanaan, pengembangan, maupun penggunaan produk industri di wilayah kewenangannya. Egoisme sektoral masih nampak menonjol.
20. Dominasi produk impor ilegal di pasaran telah mendistorsi harga produk lokal sehingga melemahkan daya saing produk lokal di pasar lokal dan melemahkan minat investor untuk mengoperasikan pabrik di Indonesia.
21. Sekalipun dari segi teknis-produksi perusahaan dalam negeri mampu memproduksi komponen tertentu PLTN, tetapi bila dana dalam negeri untuk membiayai produksi

tersebut tidak tersedia maka kondisi kelangkaan dana tersebut dapat menurunkan besaran partisipasi industri nasional. Perlu dukungan mekanisme pendanaan yang tepat.

22. Industri tertentu (contohnya industri berbasis kayu/mebel dan rotan) di dalam negeri banyak yang gulung tikar karena bahan bakunya diselundupkan ke luar negeri atau diekspor dalam kondisi mentah. Kondisi ini mengakibatkan efek berantai, karena akan menghidupi industri sejenis di luar negeri (khususnya Malaysia dan China) tetapi semakin semakin memperlemah daya saing produk nasional, baik di pasar global.
23. Matinya beberapa industri berbasis bahan baku lokal tersebut juga dipicu oleh penerapan pajak pertambahan nilai (sekitar 10%) terhadap produk olahan sehingga para produsen bahan baku seperti kayu gelondongan, rotan, biji coklat lebih suka mengekspor bahan mentah (dari pada produk olahan) keluar negeri, misalnya ke Malaysia dan China. Hal ini mengakibatkan efek berantai yang merugikan industri nasional sebab (1) produk ekspor tersebut akan diolah di luar negeri dan akan diekspor kembali ke Indonesia dengan harga yang berlipat, dan (2) industri dalam negeri bisa mati karena kelangkaan bahan baku, (3) para calon investor tidak tertarik untuk membangun pabrik di sini, (4) para investor tidak lagi tertarik untuk mengoperasikan industrinya yang sudah terlanjur direlokasi ke Indonesia (karena alasan kedekatan dengan bahan baku) sebab mereka akan bisa mendapatkan bahan baku melalui impor, dan (5) kehilangan kesempatan untuk menyerap tenaga kerja dalam proses peningkatan nilai tambah, serta (6) ada kemungkinan tambahan jumlah pengangguran bila ada penutupan pabrik.

B. Demokratisasi dan Otonomi Daerah

1. PEMDA berpacu mendongkrak PAD dengan membuat PERDA tentang pajak, retribusi, dan biaya perijinan lain tanpa mengindahkan keselarasan/kesesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi hirarkinya..
2. Korupsi menyebar ke seluruh Indonesia sehingga biaya operasi produksi industri meningkat 6,8% karena pungutan liar dan meningkatnya biaya perijinan sampai 64%.
3. Benturan kepentingan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, khususnya dalam kebijakan perijinan, fiskal, dan pajak-retribusi.
4. Inkonsistensi pelaksanaan peraturan di lapangan
5. Lemahnya saling pembelajaran antara sektor
6. Akibat adanya *vested interest*, beberapa pejabat pemerintah telah berlaku tidak adil terhadap perusahaan nasional untuk memenangkan tender terbuka pekerjaan EPC.
7. Lemahnya kemampuan perencanaan di kalangan SDM di daerah.

C. Efek Krisis Multi-Dimensi (1997-sekarang):

1. Sebagai akibat krisis, *demand* dalam negeri (khususnya oleh perusahaan dalam negeri) untuk produk komponen mekanik tertentu berkurang drastis sehingga beberapa perusahaan manufaktur telah mengalihkan bisnis intinya untuk mengikuti permintaan pasar yang telah berubah. Hal ini mengakibatkan hilangnya *core competence*. Perusahaan EPC tertentu malah berniat untuk mengakhiri bisnis manufakturnya dan berkonsentrasi pada pekerjaan desain dan rekayasa yang risiko bisnisnya relatif kecil. (modal kecil dengan ROI tinggi; fleksibilitas dalam manajemen operasi dan SDM, dll.)
2. Industri berbasis bahan baku lokal (mayoritas UKM) mampu bertahan bahkan mengalami peningkatan produktivitas selama krisis.
3. Khusus untuk produk terkait dengan industri agro (misalnya: boiler dan separator) permintaan malah meningkat
4. Pembiayaan infrastruktur turun dari 5% menjadi 2% PDB setelah krisis
5. Penghapusan BUMNIS patut disayangkan
6. Rata-rata tingkat utilisasi (pemanfaatan kapasitas terpasang) di sektor industri logam, mesin, elektronika dan aneka (ILMEA) dibawah 60% (semester I 2004), bahkan untuk industri baja hanya sekitar 40%. Dengan demikian maka kapasitas terpasang yang "idling" masih cukup besar.

D. Sinergi Kebijakan Teknologi Industri- (STUN 2004, Kementerian Riset dan Teknologi, KRT)

1. KRT-BPPT memiliki SDM dan *hardware* berkualitas tinggi tetapi tidak punya akses ke industri nasional, sementara Departemen Perindustrian (DEPERIND) memiliki kondisi yang sebaliknya: SDM dan *hardware* rendah kualitasnya tetapi memiliki akses luas kepada industri, dan
2. KRT-BPPT memiliki SDM dan *hardware* berkualitas tetapi lebih banyak *idling* dan tak memiliki dana sementara PEMDA DKI memiliki uang, kenapa tidak bekerja sama?
3. KRT-BPPT tidak mempertimbangkan *Nilai* budaya dalam pengembangan /penerapan teknologi sehingga banyak distorsi lahan dalam aplikasi teknologi.
4. Mungkin UU No. 5 tahun 1984 perlu direvisi, untuk setidaknya memperjelas pengertian istilah PEMERINTAH serta perlunya memerinci dan menyinergikan +mengharmonisasikan pelaksanaan TUSIWEHAWATA (tugas, fungsi, wewenang, hak, kewajiban, dan tanggung jawab) dari berbagai instansi pemerintah di dalam kegiatan perencanaan dan pengembangan industri agar terjadi **sinergi vertikal dan horisontal**, alias tidak saling bertabrakan pada keseluruhan level.
5. Perlu dibentuk Forum Konsultasi Teknologi Industri untuk mempertemukan aspirasi berbagai stakeholder di dalam merumuskan kebijakan teknologi dan industri nasional.

E. Pengembangan IPTEK Dan Alih Teknologi Untuk Mendukung Kegiatan Industri dan Ekonomi

1. UU No. 18 tahun 2002 tentang IPTEK sudah cukup komprehensif mengatur kegiatan LITBANGPEN IPTEK tetapi saat ini masih terganjal dengan macetnya pembuatan PP Alih Teknologi di DEPKEU berkaitan dengan aspek pajaknya.
2. Apresiasi terhadap HAKI masih rendah sehingga di kalangan Peneliti maupun Pengusaha kurang memiliki motivasi untuk berinovasi, yang terjadi malahan pembajakan HAKI yang marak, atau bisnis dibidang perakitan dan penjualan semata.
3. Kerja birokrasi cenderung lamban tidak bisa mengikuti perkembangan sektor ekonomi sehingga membuat implementasi kebijakan sektor ekonomi yang dirumuskan baik oleh pemerintah sendiri maupun oleh KADIN (dan berbagai asosiasi di bawah koordinasinya) menjadi lamban dan terhambat sehingga susah mencapai target.

F. Kebijakan Pengembangan Industri 2005-2009

(Target Pertumbuhan rata-rata 8% p.a)

1. Prioritas I : industri berbasis agro (kelapa sawit, karet, kopi, tembakau, dll.)
2. Prioritas II : industri alat transportasi (kendaraan, kapal, kedirgantaraan)
3. Prioritas III : industri telematika (peralatan IT)
4. Prioritas IV : industri manufaktur (TPT, keramik, elektronika, dll.)
5. (Perlu dikaji, industri nuklir dapat masuk ke prioritas yang mana)

G. Kondusivitas Iklim Investasi

1. Kurangnya transparansi dan tingginya ketidakpastian hukum, khususnya bidang perpajakan, bea cukai, dan perburuan telah menghambat investasi. (pernyataan Duta Besar Jepang 15 Feb. 2005)
2. Perijinan birokratis, sarat KKN, dan biaya siluman
3. Infrastruktur lemah, baik teknis (jalan, listrik, air, transportasi, komunikasi, pengolahan limbah, keselamatan industri) maupun manajemen (regulasi, hukum, standarisasi, kepabeanaan, HAKI)
4. Investor menginginkan pemerintahan yang profesional
5. Gangguan keamanan terhadap kegiatan produksi di sekitar pabrik menimbulkan ekonomi biaya tinggi sehingga telah menurunkan minat investor

6. Pada proyek dengan pendanaan luar negeri, sering terjadinya kompetisi tidak sehat antara produk impor dan produk dalam negeri. Hal ini terjadi karena posisi tawar pemerintah sangat rendah di dalam penentuan barang modal untuk keperluan proyek sehingga pihak penyandang dana bisa memaksakan pemakaian produk dari negara asalnya, meskipun produk dalam negeri tidak kalah dalam segi harga maupun kualitasnya. Kondisi ini jelas memperlemah daya saing produk nasional dan memperlambat laju perkembangan industri nasional.
7. Keppres No. 29 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Atap belum berjalan sepenuhnya karena kegiatan perijinan pada kantor departemen teknis masih dijadikan barang dagangan sehingga susah dijadikan satu atap di BKPM.
8. Banyak peraturan, khususnya dalam bidang pajak yang bias/tidak spesifik/tidak rinci yang nampaknya sengaja dibuat untuk menimbulkan tafsir sepihak oleh oknum pemerintah pelaksana yang kenyataannya merupakan jebakan bagi para pengusaha sehingga menimbulkan konsekuensi finansial besar, karena pengusaha selalu dalam posisi yang lemah dan disalahkan.

H. Kepastian Hukum dan Regulasi

1. Regulasi sering berubah sehingga menimbulkan ketidakpastian bisnis
2. Intervensi pribadi, golongan, dan politik dalam urusan bisnis/industri
3. *Low enforcement of law* (tidak ada konsistensi, konsekuensi, dan koherensi) dalam penegakkan hukum dan peraturan lainnya.
4. Benturan vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

I. Kinerja Ekspor-Impor 2004

1. Januari – Desember 2004 nilai ekspor 69,71 miliar (meningkat 11,49% dibanding 2003), tapi sebaliknya nilai impor 46,18 miliar (meningkat 39,58% dibanding 2003). Komposisi ekspor: Komposisi impor: minyak-gas (52,36%) dan non minyak-gas (35,74%), Komposisi impor non minyak-gas adalah: mesin dan pesawat mekanik (18,11% setara dengan 6,3 miliar dollar AS), dan barang konsumsi (8,17%), barang modal (13,19%, bahan baku/penolong (78,64%)
2. Pada tahun 2004, daya saing industri nasional masih rendah (Indonesia ada pada posisi nomer 69 dari 104 negara; Malaysia (31), Thailand (34). Hal itu utamanya disebabkan ketidakmampuan memenuhi *QCD Criteria* dalam persaingan global. Dari segi *cost of production* misalnya, masih susah direduksi karena beberapa faktor, a.l.: ketergantungan impor bahan baku dan bahan modal, kadar teknologi rendah, persentase lokal rendah, dan ekonomi biaya tinggi (tinggi biaya uang, KKN, pungutan liar, infrastruktur lemah, ketidakpastian hukum dan regulasi, gangguan keamanan, kecelakaan kerja, dll.)
3. Kebijakan ekspor produk industri berat & strategis (misalnya gerbong kereta) yang tidak dilengkapi paket kebijakan pembiayaan telah menurunkan daya saing produk/perusahaan Indonesia.
4. Pembelian produk eks ekspor Indonesia oleh perusahaan Indonesia dari pemasok luar negeri
5. Kebijakan teknologi industri masih berorientasi kepada teknologi rendahan (misalnya industri TPT) dengan pangsa pasar yang terus menurun karena semakin banyak negara yang memperebutkan pangsa eksportnya, dengan alasan teknologinya mudah dikuasai oleh tenaga berkeahlian rendah, dan sudah ditinggalkan oleh negara-negara maju.

IV.2 Perkembangan Industri Manufaktur Nasional

Pada Tabel 1 ditampilkan data perkembangan sektor industri manufaktur nasional tahun 1995-2002 untuk tiap sub sektor. Diantara 9 sub sektor, maka sub sektor nomer 6, yakni logam dasar, mesin dan baja serta sub sektor nomer 8, yakni alat transportasi, mesin, dan perlengkapan dipandang sebagai sub sektor yang paling terkait langsung dengan manufaktur sistem dan komponen PLTN. Kedua sub sektor ini mengalami kemerosotan cukup signifikan pada tahun 1998, yaitu masing-masing sebesar -26,9% dan -52,3%. Akan tetapi pada tahun 2002 kedua subsektor tersebut telah tumbuh masing-masing sekitar 3,2% dan 4,8%.^[2]

Dibanding dengan beberapa hasil studi partisipasi nasional yang lalu, saat ini juga telah diidentifikasi beberapa aktivitas industri baru antara lain manufaktur komponen mekanik berbasis *stainless steel* (SUS) yang pada beberapa studi terdahulu belum muncul sehingga ada calon vendor PLTN yang sangat meragukan kemampuan industri nasional di dalam penanganan produk SUS.^[3]

Bila dipakai acuan tahun 1996 sebagai tahun dasar sebelum krisis ekonomi, maka diperkirakan kedua subsektor tersebut telah pulih sepenuhnya dari kemerosotan akibat krisis. Demikian juga dengan semua subsektor yang lain sehingga dapat disimpulkan bahwa industri manufaktur nasional secara total telah pulih dari akibat krisis ekonomi pada tahun 2003. Bahkan secara kumulatif industri manufaktur nasional telah berkembang secara mantab sejak tahun 1999 dengan tingkat perkembangan berturut-turut 3,9%, 6,0%, 3,1%, dan 3,4% pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Perkembangan industri manufaktur ini secara total telah membantu perkembangan PDB nasional sehingga tumbuh secara mantab sejak 1999 – 2003 berturut-turut sebesar 0,8%, 4,9%, 3,5%, 3,7%, dan 4,7% seperti ditampilkan pada Tabel 2.^[2]

Tabel 1. Pertumbuhan Output Riil Industri Manufaktur Menurut Sub-Sektor (% Y-O-Y), 1995-2002

No	SUB-SEKTOR INDUSTRI	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
A	INDUSTRI MIGAS	-4,7	11,1	-2,0	3,7	6,8	-1,7	-8,5	1,2
1	Pengilangan Minyak Bumi	-2,8	16,7	-5,8	6,5	4,7	3,6	1,7	-2,6
2	Gas Alam Cair	-7,0	4,1	3,3	0,2	9,7	-8,4	-10,9	7,6
B	INDUSTRI NON-MIGAS	13,1	11,7	6,1	-13,1	3,5	7,0	3,9	3,7
1	Makanan, Minuman, Tembakau	16,5	7,2	12,3	-0,2	4,6	3,6	2,3	2,6
2	Tekstil, Barang Kulit, Alas Kaki	10,5	8,7	-3,8	-14,9	8,5	8,0	4,3	4,5
3	Barang Kayu dan Hasil Hutan lain	3,0	3,2	-2,9	-25,5	-13,5	6,9	-0,3	0,0
4	Kertas dan Barang Cetak	13,5	6,9	8,4	-4,0	2,3	2,6	-5,7	2,9
5	Pupuk, Kimia, Barang dari karet	11,9	9,0	3,5	-16,0	10,3	7,1	5,0	7,0
6	Semen dan Barang Galian bukan logam	20,1	11,0	3,5	-29,8	5,2	5,5	12,3	10,1
7	Logam Dasar, Besi dan Baja	18,6	8,0	-0,5	-26,9	-0,2	13,1	-0,3	3,2
8	Alat Transport, Mesin, dan Perlengkapan	7,7	4,6	-1,1	-52,3	-10,3	43,5	20,3	4,8
9	Barang lainnya	8,9	9,7	6,8	-36,0	-1,5	12,8	21,0	10,2
	TOTAL MANUFAKTUR	10,9	11,6	5,3	-11,4	3,9	6,0	3,1	3,4

Sumber: BPS

Dengan demikian, kesan adanya gejala "*de-industrialisasi*" yang ditandai dengan negatifnya laju perkembangan industri dapat ditepis, atau setidaknya walaupun gejala itu terjadi maka hanya pada tahun 1998 saja, yang salah satunya ditandai oleh merosotnya laju perkembangan total industri manufaktur nasional sebesar -11,8%. Sedangkan setelah tahun 1999 industri manufaktur berkembang mantab berturut-turut

sebesar 3,9%, 6,0%, 3,1%, dan 3,4% masing-masing pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002.

Tabel 2. Pertumbuhan PDB Riil Menurut Sektor (% Y-O-Y), 1995-2003

No	SEKTOR INDUSTRI	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
1	Pertanian	4,4	3,1	1,0	-1,3	2,2	1,9	1,7	2,0	2,5
2	Pertambangan	6,7	6,3	2,1	-2,8	-1,6	5,5	1,3	2,5	0,5
3	Manufaktur	10,9	11,6	5,3	-11,4	3,9	6,0	3,1	3,4	3,5
4	Listrik, Gas, dan Air Bersih	15,9	13,6	12,4	3,0	8,3	7,6	8,2	6,0	6,8
5	Konstruksi	12,9	12,8	7,4	-36,4	-1,9	5,6	4,4	4,9	6,7
6	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	7,9	8,2	5,8	-18,2	-0,1	5,7	3,7	3,8	3,7
7	Transportasi & Komunikasi	8,5	8,7	7,0	-15,1	-0,8	8,6	7,8	8,0	10,7
8	Keuangan, Leasing, dan Jasa Bisnis	11,0	6,0	5,9	-26,6	-7,2	4,6	5,4	5,7	6,3
9	Jasa-jasa lainnya	3,3	3,4	3,6	-3,8	1,9	2,3	3,1	2,1	3,4
	PDB	8,2	7,8	4,7	-13,1	0,8	4,9	3,5	3,7	4,1

Sumber: BPS

Selanjutnya pada Tabel 3 ditunjukkan proyeksi perkembangan industri nasional untuk tahun 2005-2009 yang besarnya diperkirakan 8,3% untuk keseluruhan industri, termasuk di dalamnya dua subsektor manufacturing yang terkait erat dengan produksi sistem dan komponen mekanik PLTN. Untuk kedua subsektor tersebut, yaitu subsektor logam dasar, mesin dan baja serta sub sektor transportasi, mesin, dan perlengkapan diproyeksikan untuk berkembang masing-masing sebesar 6,1% dan 11,3%.^[3] Tentu angka-angka ini belum memasukkan kemungkinan adanya proyek PLTN antara 2005-2009. Menjadi tantangan bagi proyek pembangunan PLTN apakah mampu meningkatkan perkembangan kedua subsektor di atas. Untuk alasan ini, menjadi urgen untuk memasukkan PLTN ke dalam skenario pengembangan industri nasional 2005-2009 sehingga sejak dini dapat diidentifikasi kemungkinan untuk bersinergi positif. Dengan demikian, masuknya PLTN ke Indonesia tidak semata alasan menjawab kebutuhan energi tetapi juga dalam rangka menumbuh-kembangkan industri nasional melalui efek tetesan air. Langkah sinergi ini dapat diawali dengan masuknya BATAN ke dalam Forum Konsultasi Teknologi Industri (FKTI) yang sudah digagas oleh Kantor Menteri Riset dan Teknologi sejak 2004.

Forum konsultasi ini akan mengintegrasikan kebijakan teknologi industri dengan melibatkan *stakeholder* terkait, antara lain pemerintah (KRT, DRN, Depperin, Depkeu, dan instansi terkait lain), pelaku bisnis, asosiasi bisnis, akademisi, dan LSM. Integrasi kebijakan ini akan dapat dimulai dari perumusan kluster industri dan unggulannya, program riset bersama dan skema difusinya, skema insentif, anggaran, dan sistem evaluasi serta kontrol.^[5]

Tabel 3 . Sasaran Kuantitatif Pembangunan Sektor Industri 2005-2009

No	SEKTOR INDUSTRI	PERKEMBANGAN (%) TAHUN 2003	PROYEKSI LAJU PERKEMBANGAN (%) TAHUN 2005-09
1	Makanan, minuman, dan Tembakau	2,14	6,8
2	Tekstil, Barang Kulit, dan Alas Kaki	3,72	6,2
3	Barang Kayu dan Hasil Hutan Lainnya	1,89	8,5
4	Kertas dan Barang Cetak	7,87	9,5
5	Pupuk, Kimia, dan Barang dari Karet	10,41	11,3
6	Semen dan Barang Galian Bukan Logam	6,35	9,4
7	Logam Dasar, Besi, dan Baja	-1,63	6,1
8	Alat Angkut, Mesin, dan Peralatannya	4,27	11,3
9	Barang Lainnya	7,92	9,8
	TOTAL INDUSTRI	3,3	8,3

V. PEMUTAKHIRAN PARTISIPASI INDUSTRI NASIONAL

Seperti telah disebutkan di depan, sebagai akibat krisis ekonomi 1997, pada tahun 1998 industri manufaktur nasional secara kumulatif mengalami kemerosotan - 11,4%, tetapi sejak tahun 1999 telah mengalami perkembangan positif berturut-turut sebesar 3,9%, 6,0%, 3,1%, dan 3,4% masing-masing untuk tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Hal ini menunjukkan bahwa sejak 2003 ini dapat dikatakan bahwa secara total perkembangan industri manufaktur nasional telah kembali pulih dari akibat krisis 1997. Konsekuensinya, semua hasil studi partisipasi nasional pembangunan PLTN yang dilakukan sebelum krisis ekonomi dapat dipakai lagi sebagai acuan perencanaan pengembangan partisipasi industri nasional. Begitu pula studi partisipasi nasional PLTN Desalinasi yang belum mempertimbangkan efek krisis ekonomi 1997. Meskipun begitu, hasil studi tersebut masih perlu dimutakhirkan secara berkelanjutan sesuai perkembangan industri nasional terkini.

Pemutakhiran kemampuan partisipasi nasional ini harus mempertimbangkan berbagai kondisi riil dan kecenderungan lingkungan strategis nasional dan global yang ada, mulai dari tahap hulu sampai hilir pengelolaan industri nasional, yakni mulai dari rencana pemerintah untuk melakukan regulasi perijinan investasi sampai pada perumusan sasaran kebijakan industri jangka panjang.

VI. ANALISIS DAN USULAN PEMECAHAN ISU FUNDAMENTAL INDUSTRI NASIONAL

Untuk tujuan analisis, kesembilan parameter perkembangan industri nasional tersebut di atas selanjutnya akan diklasifikasikan atau dipetakan kembali sesuai dengan hirarki sistemik, tingkat kepentingan, serta substansi dan signifikansinya terhadap upaya mencapai sinergi pengembangan industri nasional, agar memudahkan pemahaman sistemik terhadap isu fundamental tersebut sekaligus memudahkan upaya perumusan usulan pemecahannya. Untuk itu, keseluruhan isu fundamental tersebut diklasifikasikan dan disarikan ke dalam 5 aspek, yaitu struktural, operasional, teknis, finansial, dan kultural, untuk selanjutnya diusulkan metode pemecahannya disertai dengan identifikasi *stakeholder* terkait. Secara rinci kelima aspek ini ditampilkan pada Tabel 4 yang secara global akan memberikan gambaran peta umum berbagai isu terkait dengan perkembangan industri manufaktur nasional beserta langkah pemecahannya.

Analisis terhadap Tabel 4 menunjukkan bahwa diantara kelima aspek isu krusial: struktural, operasional, teknis, finansial, dan kultural, maka isu kultural adalah yang paling mendasar dan utama sehingga harus menjadi sasaran pembenahan yang pertama. Aspek kultural ini menyangkut keberpihakan terhadap implementasi nilai-nilai dasar kehidupan ke dalam praksis manajemen yang merupakan pengendali, tolok ukur, sekaligus tujuan perilaku manusia.

Nilai-nilai dasar alternatif yang dipandang tepat untuk diimplementasikan di dalam pengelolaan industri di Indonesia agar dapat menghasilkan sinergi tingkat tinggi atas kebijakan pengembangan industri nasional antara lain adalah Tata Kelola Korporasi (GCG) dan Manajemen Mutu Terpadu (MMT). Implementasi Nilai-Nilai ini diyakini akan mengantarkan kepada manajemen teknologi-industri yang sistemik dan sinerjis. Atau dengan kata lain tercipta konsensus, komitmen, konsistensi, koherensi, dan koordinasi diantara berbagai *stakeholder*. Dengan kondisi awal seperti itu maka diharapkan bahwa arah pengembangan industri nasional akan lebih pasti, demikian pula konsekuensinya terhadap perencanaan program partisipasi industri nasional dalam proyek PLTN.

VII. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Bila berbagai isu mendasar pada industri nasional terkait dengan lokalisasi produksi komponen dan jasa PLTN dapat diatasi maka industri nasional akan cukup berpotensi untuk berpartisipasi dalam proyek PLTN dan siap menyerap *multiplier effect* yang akan menciptakan lapangan kerja baru.
2. Kegiatan pengkajian perkembangan industri nasional dalam bidang-bidang terkait sangat perlu dilakukan secara berkesinambungan dengan melibatkan berbagai *stakeholder* agar supaya selalu tersedia data terkini dan representatif, serta agar semua pemikiran terkait dapat terserap dalam pengambilan keputusan pembangunan PLTN di Indonesia. Dengan demikian maka integrasi PLTN (yang diyakini dapat menimbulkan *multiplier-effect* yang besar) ke dalam kebijakan ekonomi-energi-industri-IPTEK nasional dapat dimulai pada momentum yang tepat.
3. Aspek kultural merupakan aspek yang paling mendasar diantara kelima aspek yang lain: struktural, operasional, teknis, finansial, dan kultural, sehingga harus menjadi sasaran awal pembenahan. Aspek kultural ini menyangkut keberpihakan terhadap implementasi nilai-nilai dasar kehidupan ke dalam praksis manajemen yang merupakan pengendali, tolok ukur, sekaligus tujuan perilaku manusia. Nilai-nilai dasar alternatif yang dipandang tepat untuk diimplementasikan di dalam pengelolaan industri di Indonesia agar dapat menghasilkan sinergi tingkat tinggi atas kebijakan pengembangan industri nasional antara lain adalah Tata Kelola Korporasi (GCG) dan Manajemen Mutu Terpadu (MMT). Implementasi Nilai-Nilai ini diyakini akan mengantarkan kepada manajemen teknologi-industri yang sistemik dan sinerjis. Atau dengan kata lain tercipta konsensus, komitmen, konsistensi, koherensi, dan koordinasi diantara berbagai *stakeholder*.
4. Untuk meningkatkan keberterimaan introduksi PLTN, maka perlu dibangun wacana bahwa kehadiran PLTN akan dapat memicu sekaligus memacu perkembangan industri dan pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu maka sedini mungkin wacana PLTN masuk dalam kebijakan pengembangan industri nasional. Koordinasi antara *stakeholder* perlu segera digalakkan, misalnya dimulai dengan masuknya BATAN ke dalam Forum Konsultasi Teknologi Industri yang digagas oleh Kementerian Riset dan Teknologi dengan melibatkan Depperin, Depkeu, instansi pemerintah terkait, maupun pelaku bisnis, dan akademisi, atau mengintegrasikan *road map PLTN* ke dalam kebijakan pengembangan industri nasional yang sedang digagas oleh Departemen Perindustrian dan telah didukung oleh berbagai LPND.
5. Meski krisis multi-dimensi 1997 telah menyebabkan industri manufaktur nasional secara kumulatif mengalami kemerosotan -11,4% pada tahun 1988, tetapi sejak tahun 1999 sampai 2002 telah mengalami perkembangan positif berturut-turut sebesar 3,9%, 6,0%, 3,1%, dan 3,4%. Hal ini menunjukkan bahwa sejak 2003, dari

segi tingkat perkembangan, dapat dikatakan bahwa industri manufaktur nasional telah kembali pulih dari akibat krisis ekonomi 1997 sehingga sebelum ada hasil studi terbaru yang definitif, mulai 2002 semua hasil studi partisipasi nasional pembangunan PLTN yang dilakukan sebelum krisis ekonomi masih dapat dipakai lagi sebagai acuan perencanaan pengembangan partisipasi industri nasional.

DAFTAR PUSTAKA

1. BATAN, *"Comprehensive Assessment of Different Energy Sources For Electricity Generation in Indonesia-Energy Demand and Supply Analisis (Phase I)"*, Jakarta, 2002.
2. ANONIM, *"Target Pertumbuhan Industri 8 Persen per Tahun pada Periode 2005-2009, Bisakah Dicapai?"* Harian KOMPAS, edisi 17 September 2004, halaman 14
3. JOYOSUKARTO, P., *"Study on the Prospect of Localization for the Introduction of MHI PWR NPP to Indonesia based on QA Approach"*, A Study Report, Kobe, 1988.
4. ANONIM, *"Tiga Kelompok Industri Jadi Prioritas Pengembangan"*, Harian KOMPAS, edisi 23 Oktober 2004, halaman 13.
5. RAHIM, F. dan IMAN, M.S., *"Mekanisme Sinergi Kebijakan Teknologi Industri"*, Seminar Sains dan Teknologi Untuk Negeri 2004, Jakarta, Mei, 2004.
6. JOYOSUKARTO, P., *"Budaya Keselamatan Total Untuk Bidang Industri"*, Seminar Nasional Keamanan, Keselamatan dan Kedamaian Nuklir, Hotel Nikko, Jakarta, 15 Desember 2003

**Tabel 4. Rincian Isu Fundamental Terkait Dengan Status Industri Manufaktur Nasional
Serta Usulan Pemecahannya**

No	KLASIFIKASI ISU	RINCIAN ISU TERKAIT LOKALISASI	USULAN PEMECAHAN	PIHAK TERKAIT	REFERENSI/ CATATAN
01	Struktural	<p>a. Pengingkaran atas hakekat kekuasaan atas perumusan kebijakan publik;</p> <p>b. Pencampuran antara domain publik dan domain politik</p> <p>c. Amanat UUD 1945 Pasal 33 belum sepenuhnya terjabarkan di dalam UU No. 18 tahun 2002 tentang IPTEK dan UU No. 5 tahun 1984 tentang Perindustrian</p> <p>d. Lemahnya koordinasi dan integrasi vertikal dan horizontal dalam pengelolaan industri</p> <p>e. Penajaman keterkaitan peran institusi terkait dalam perencanaan, pembinaan, dan pengembangan industri</p> <p>f. Pemisahan DEPPERINDAG akan memperpanjang rantai koordinasi meskipun dimaksudkan untuk secara simultan meningkatkan laju percepatan ekonomi dan industri nasional</p> <p>g. Sisa-sisa otoriterisme, feodalisme, dan egisme sektoral masih nampak dalam praktek pemerintahan</p> <p>h. Adanya tumpang tindih (<i>overlapping</i>) kegiatan koordinasi dan regulasi antara beberapa institusi sehingga tidak efektif.</p>	<p>a. Pendekatan sistemik berbasis Nilai (<i>Value</i>) untuk pengelolaan negara; Sistem yang terbentuk sekaligus berfungsi sebagai pengendali perilaku penyelenggaraan negara/pemerintahan.</p> <p>b. Kepastian visi /arah pengembangan Industri nasional dengan melihat realita dan kecenderungan yang ada; Revisi UU No. 18 tahun 2002 dan UU No. 5 tahun 1984, atau dijabarkan lagi dengan Aturan Perundangan lain untuk integrasi vertikal kebijakan ekonomi-industri (energi)-iptek (<i>grand design</i>) dengan perkembangan lingkungan strategis.</p> <p>d. Koordinasi tingkat tinggi untuk kebijakan EKOINTEK agar semua level dan ragam kebijakan dapat terintegrasi secara vertikal dan horizontal sehingga sinergis.</p> <p>e. Diperlukan Audit Manajemen pemerintahan untuk mengetahui efektivitas organisasi pemerintah saat ini. Audit ini dapat menjurus ke penetapan otoritas tunggal (<i>single authority</i>) untuk koordinasi dan regulasi kegiatan tertentu.</p> <p>f. Perlu dibangun Industri pendukung di semua sektor industri untuk memangkas ketergantungan impor bahan baku dan modal.</p>	<p>DPR dan Pemerintah (KRT-DEPERIN-DEP ESDM-BATAN)-KADIN-ASOSIASI INDUSTRI</p>	<p>MOCIE (Korea), MITI (Jepang), Prinsip ITATA dalam Tata Kelola Korporasi (GCG),</p> <p>Catatan: I : Independen T : Transparansi A : Akuntabilitas T : Tanggung Jawab A : Adil</p>

No	KLASIFIKASI ISU	RINCIAN ISU TERKAIT LOKALISASI	USULAN PEMECAHAN	PIHAK TERKAIT	REFERENSI/ CATATAN
02	Operasional	<p>a. Kebijakan Teknologi 2 jalur menimbulkan disparitas antara KRT(+LPND) yang sumber dayanya cangguh tapi tidak memiliki akses industri dibanding DEPERINDAG (X)</p> <p>b. Pengembangan industri tidak fokus (<i>broad base</i>) dan mendalam tapi di permukaan saja</p> <p>c. Koordinasi antar sektor lemah</p> <p>d. Perumusan kebijakan sektoral bersifat sempit, sarat vested interest, dan jangka pendek (taktis)</p> <p>e. Pembangunan industri berorientasi teknologi rendah dan jenis peraktian, konsentrasi pada sektor-sektor yang semakin kurang signifikan dengan pangsa pasar terbatas, misal TPT</p> <p>f. Perencanaan <i>demand-supply</i> material dan produk manufaktur belum terintegrasi</p> <p>g. Rendahnya ketersediaan dan kesiapan infrastruktur: klembeagaan, legal, teknis (listrik, air, transportasi, pengolahan limbah, dll.)</p> <p>h. Bahan baku material produksi harus di-procure (<i>outsourcing</i>) dari luar negeri dan dikenakan pajak sampai 25%</p> <p>i. Cara bisnis yang <i>one-to-one customer feedback</i> tidak ada sinergitas sistemik</p> <p>j. Daya saling Industri nasional rendah karena ketidakmampuan memenuhi Kriteria QCD.</p>	<p>a. Pembentukan Forum Konsultasi Teknologi-Industri (FKTI) dengan SKB Menteri EKOINTEK terkait Pendekatan sistemik 3H: (Harmonisasi Hulu-Hilir) untuk 5K dalam pengelolaan industri, baik dari sudut pandang sistem manajemen, proses, maupun produk. untuk tujuan menekan <i>high cost economy</i> dan mengoptimalkan <i>economic of scale</i> *)</p> <p>c. Prioritisasi (penajaman/fokus) Kebijakan Industri dimulai dari industri berbasis bahan baku lokal/nasional untuk memangkas ketergantungan impor sekaligus meningkatkan ekspor</p> <p>d. Integrasi PLTN +industri peralatan Kedokteran Nuklir ke dalam kebijakan Industri nasional 2005-2009 (Integrasi Landmark BATAN Bidang Kesehatan, Energi, dan Manufaktur)</p> <p>e. Masuknya BATAN ke FKTI untuk tujuan d)</p> <p>f. Pengualan Infrastruktur didukung dengan pendanaan yang tepat</p> <p>g. Penurunan pajak bahan baku material</p> <p>h. Kriteria QCD, khususnya yang terkait dengan <i>economic of scale</i> dapat mudah dicapai dengan produksi bersama (<i>full manufacturing</i>) antar berbagai perusahaan</p> <p>j. Deregulasi perijinan Investasi</p>	<p>KRT-DEPERIND-DEPEKEU-DEPESDM-BATAN-KADIN-ASOSIASI INDUSTRI</p>	<p>Prinsip ITATA dalam Tata Kelola Korporasi (GCG);</p> <p>UU No. 5 tahun 1984;</p> <p>Catatan: I : Independen T : Transparansi A : Akuntabilitas T : Tanggung Jawab A : Adil</p> <p>*) Catatan: 5K meliputi: Konsensus Komitmen Konsisten Koherensi Koordinasi</p>

No	KLASIFIKASI ISU	RINCIAN ISU TERKAIT LOKALISASI	USULAN PEMECAHAN	PIHAK TERKAIT	REFERENSI/ CATATAN
03	Teknis: desain, Procurement, material, manufacturin g, konstruksi, uji fungsi, dan transportasi	a. Kompetensi personil rendah: -knowledge (K) -skill (S) -attitude (A) -creativity (C)	a. Alih Teknologi secara komprehensif (K,S,A, C) b. <i>competence-based HRD & personnel training</i>	DEPERIND- BATAN-KADIN- ASOSIASI INDUSTRI	
		b. Kompetensi produksi (perusahaan) rendah: - kapasitas produksi rendah dan buta pasar - relokansi pengembangan kapasitas produksi karena terbentuk " <i>economic of scale</i> " dan kurang ramahnya kebijakan kredit Perbankan - implementasi manajemen mutu masih rendah - standarisasi sistem, proses, dan produk perlu ditingkatkan - <i>one-to-one customer feedback</i>	c. Bentuk kelembagaan untuk kepemilikan dan operasi PLTN d. Canangkan program <i>self-reliance</i> e. Jabarkan pohon industri/piramida produksi f. Bentuk konsorsium pelaksana program <i>self reliance</i> (target industry) g. Perjanjian lisensi produksi h. Insentif produksi i. Implementasi standar sistem manajemen, proses, dan produk j. <i>QCD Criteria</i>	DEPERIND- BATAN- DEPKEU- KADIN- ASOSIASI INDUSTRI	
		c. Tidak teridentifikasinya potensi kebutuhan dalam negeri (yang sebenarnya sangat besar: 4,6 milyar dolar per tahun, menurut Dirjen: IKLGD Depperindag, 2004) d. Lemahnya kemampuan <i>seismic design and construction</i> perusahaan dalam negeri e. Transportasi barang antar pulau dan antar negara masih didominasi oleh kapal asing (90%)	k. Integrasi perencanaan <i>demand-supply</i> dikoordinasikan oleh DEPERIND & KADIN l. Asistensi oleh calon vendor untuk mengembangkan kompetensi nasional m. Dereglasi bidang transportasi dengan memaksimalkan potensi dalam negeri	DEPERIND- BATAN-KADIN- ASOSIASI INDUSTRI- DEPHUB	

No	KLASIFIKASI ISU	RINCIAN ISU TERKAIT LOKALISASI	USULAN PEMECAHAN	PIHAK TERKAIT	REFERENSI/ CATATAN
04	Finansial (ekonomi, pendanaan, fiskal, moneter)	<p>a. Keterbatasan dana dalam negeri untuk pembiayaan produksi bernilai besar; (tercatat: 140 juta dollar pinjaman Bank BNI untuk pembuatan kapal TRISTAR pesanan luar negeri di PT. PAL, 2003)</p> <p>b. Tingginya bunga pinjaman komersial</p> <p>c. Pembiayaan produksi dengan pinjaman LN akan menaikkan peringkat hutang dan berpotensi mengganggu pencapaian Kriteria QCD sehingga dapat menurunkan level partisipasi nasional</p> <p>d. Perbankan kurang tertarik untuk pembiayaan bisnis manufaktur berisiko tinggi dan <i>non-quick yielding</i></p> <p>h. Prioritas pembiayaan perbankan: Jalan Tol, Telekomunikasi, dan pembangunan Listrik</p> <p>g. Iklim Investasi tidak kondusif</p> <p>h. Industri tertentu berbasis bahan baku lokal keberatan dengan pajak pertambahan nilai produk olahan</p> <p>i. Kelimpangan struktur pemilihan aset industri: konsentrasi dan kepemilikan aset dikuasai oleh sebagian kecil pengusaha sehingga mempengaruhi penegakkan hukum</p>	<p>a. Alternatif pinjaman non-komersial bergaransi pemerintah</p> <p>b. Kebijakan fiskal dan perbankan yang berpihak kepada industri manufaktur (Insentif fiskal, pajak, suku bunga rendah, depresiasi)</p> <p>c. Pembentukan konsorsium pembiayaan untuk <i>risk-sharing</i></p> <p>d. Kepastian hukum & regulasi: penyesuaian tarif, <i>price control</i>, kompensasi risiko, dll.</p> <p>e. Insentif fiskal dan perpajakan untuk industri berbasis bahan baku lokal yang berorientasi ekspor</p>	DEPERIND-BI-MENKEU-MENKEG BUMH-PERBANAS-INSTANSI TEKNIK TERKAIT	Prinsip ITATA dalam Tata Kelola Korporasi (GCG);
05	Kultural	<p>Belarapa Nilai budaya ternyata tidak kondusif untuk mendukung kemajuan. Nilai-nilai yang telah membudaya dan teratur berakut di dalam kebiasaan hidup ini antara lain: feodalisme, fundamentalisme, konsumerisme, pragmatisme, <i>uncertainty avoidance</i>, <i>NOMA (no-open minded attitude)</i>, apresiasi rendah terhadap IPTEK, apresiasi terlampau tinggi terhadap prestasi materi dan kekuasaan, dll..</p>	<p>a. Introduksi Nilai –Nilai Luhur alternatif yang tepat untuk suplemen budaya nasional</p> <p>b. Pengembangan sistem berbasis Nilai untuk mengarahkan dan menyeimbangkan natur-natural, dan aspek nature-nature dalam diri manusia</p> <p>c. Pencerahan publik dengan Nilai-nilai yang tepat: Kesejahteraan, Kualitas, Sistem, Integritas, serta berbagai Nilai derivasinya</p>	MENRISTEK, DE PERIND, MENBUD-UD-PAR, Asosiasi Industri, Civil Society	<p>a. Budaya kerja di negara maju</p> <p>b. Total Quality Management</p> <p>c. Prinsip ITATA dalam Tata Kelola Korporasi (GCG);</p> <p>d. Konsep Budaya Total¹⁶⁾</p>